

Judul : Punya nakhoda baru, BPJS kesehatan kudu tingkatkan kualitas
Tanggal : Sabtu, 21 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Punya Nakhoda Baru

BPJS Kesehatan Kudu Tingkatkan Kualitas

SENAYAN mempunyai harapan besar atas dilantikannya Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS (BPJS) Kesehatan periode 2026–2031. Purnawirawan bintang dua itu menggantikan Ali Ghufon Mukti.

Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengingatkan, memimpin lembaga sebesar BPJS Kesehatan bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada kepentingan rakyat. "Saya yakin dan optimis Pak Pujowaskito mampu untuk mengembalikan amanah itu," ujarnya, kemarin.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai direktur utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031 menggantikan Ali Ghufon Mukti pada Kamis (19/2/2026).

Penetapan kepemimpinan baru BPJS Kesehatan dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Masa jabatan direksi berlaku selama lima tahun.

Arzeti melanjutkan, dirut baru

harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam hal pelayanan, transparansi keuangan, dan penguatan sistem digital. Karena itu, Komisi IX DPR akan terus memberikan dukungan atas langkah-langkah strategis yang akan diambil dirut baru.

"Kami juga akan melakukan pengawasan agar BPJS Kesehatan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tandas politikus PKB ini.

Namun dukungan ini tentunya dibarengi dengan harapan agar ada percepatan perbaikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seperti, keluhan antrean panjang, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga kendala akses di daerah terpencil harus menjadi prioritas pembenahan.

Arzeti juga mendorong agar BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan, baik Pemerintah maupun swasta, sehingga kualitas layanan semakin merata. Juga harus semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Transformasi digital harus benar-benar memudahkan peserta, bukan justru menambah



Arzeti Bilbina

kerumitan. Evaluasi berkala juga penting agar setiap kebijakan tepat sasaran," ujar legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Ia optimis, di bawah kepemimpinan baru, BPJS Kesehatan dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang penting lagi harus hadir sebagai solusi, bukan sumber keluhan.

"Jika kepemimpinan dijalankan dengan integritas, keberanian, dan komitmen terhadap pelayanan publik, saya yakin BPJS Kesehatan akan semakin maju dan kuat," kata dia dengan yakin.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Ravindra Airlangga

meminta BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme transisi perlindungan sosial yang memadai seperti sosialisasi selama tiga bulan. Hal ini dilakukan sebelum terjadi perubahan data dan masa tenggang selama tiga bulan setelahnya, di mana kepesertaan

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tetap aktif, walau ada pemutakhiran. "Harapannya agar masyarakat rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan saat proses pemutakhiran data sosial nasional," ujar Ravindra dalam keterangannya, kemarin.

Permintaan tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan pada Rabu (11/2/2026). Rapat tersebut digelar menyikapi pembaruan data PBI dan keberlanjutan layanan jaminan kesehatan.

Ia mengatakan, proses pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSN) perlu diikuti skema transisi yang jelas agar peserta tidak langsung kehilangan status kepesertaan aktif. Dengan itu, pentingnya sosialisasi sebelum kebijakan berjalan.

Menurut dia, masa transisi itu harus disertai asistensi reaktivasi kepesertaan bagi masyarakat rentan melalui kolaborasi lintas wilayah, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. "Harapannya agar perubahan data tidak berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat," kata legislator asal Kabupaten Bogor ini.

Selain itu, Ravindra menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJSK) di tengah proyeksi pertumbuhan defisit yang mencapai rata-rata 69,5 persen pada periode 2024–2026.

Ia menyarankan BPJS Kesehatan perlu menurunkan biaya per anggota per bulan tanpa menaikkan besaran premi per anggota. Juga mempertimbangkan alternatif pendanaan seperti mekanisme pembayaran fleksibel bagi peserta mandiri, cukai kesehatan, dana abadi, dan sumber sah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Ravindra menyoroti ketimpangan beban layanan kesehatan yang masih bertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Karena itu, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menjadi kunci untuk menekan biaya layanan. ■ TIF